



Kebijakan Perlindungan Sosial dalam Merespons Krisis Covid-19

Respons negara-negara di Asia dan Pasifik

25 Maret 2020

Uraian singkat ini memaparkan implikasi krisis COVID-19 terhadap sistem perlindungan sosial dan mengambil contoh kebijakan di kawasan Asia dan Pasifik terkait perlindungan sosial. Paparan dalam uraian ini didasarkan pada dokumen ILO yang lebih komprehensif yang menawarkan pertimbangan kebijakan terkait peran perlindungan sosial dalam menanggapi dampak-dampak yang mungkin timbul akibat krisis COVID-19.¹

ILO akan terus memperbarui dokumen ini mengingat data dan informasi terbaru akan terus muncul di tengah situasi yang terus berkembang ini.

Catatan: Karena keadaan luar biasa yang diakibatkan oleh pandemi ini, telah dilakukan berbagai upaya intens oleh negara-negara. Oleh karena itu, tidak semua informasi yang terkandung dalam dokumen ini dapat sepenuhnya dikonfirmasi dengan menggunakan legislasi resmi ataupun buletin hukum.

Kunjungi situs ILO untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai tanggapan terhadap krisis COVID-19.

▶ ilo.org/covid19

Departemen Perlindungan Sosial ILO

Kantor Regional Asia dan Pasifik

¹ILO (2020). Social protection responses to the Covid-19 crisis. Country responses and policy considerations. *Spotlight Brief*. ILO: Geneva.



Pengantar – Situasi dan Tantangan

Bermula dari krisis kesehatan, pandemi COVID-19 kini telah berkembang menjadi krisis ekonomi global, dengan dampak yang hebat dan berkepanjangan pada aktivitas ekonomi, ketenagakerjaan dan perdagangan.

Estimasi yang ada saat ini memprediksi potensi krisis yang bisa mengakibatkan penurunan pendapatan global sebesar 2 triliun dolar AS (UNCTAD 2020), penurunan pertumbuhan ekonomi global dari 2,9 persen ke 1,5 persen (OECD 2020), dan meningkatkan jumlah pengangguran setidaknya 25 juta (ILO 2020).

Dengan informasi yang terbaru setiap hari terkait lonjakan klaim pengangguran dan kerugian produksi² yang lebih parah dari yang diprediksi. Ditambah dengan inisiatif beberapa negara yang mulai memberlakukan *lockdown* atau karantina nasional, kerugian yang dialami dalam hal ekonomi dan pasar tenaga kerja mungkin akan jauh lebih parah dan berlangsung lebih lama dari perkiraan ILO dalam rilis global yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Di luar hilangnya nyawa manusia secara tragis, krisis ini juga menimbulkan kerugian dalam berbagai aspek seperti meningkatnya kemiskinan dan ketidaksetaraan, serta berdampak lebih kepada kelompok rentan (Diwakar 2020).

Pemerintah dihadapkan dengan dua tantangan: menangani pandemi kesehatan dan di saat bersamaan harus mengatasi dampak sosial dan ekonomi. Ancaman yang mengerikan ini perlu dihadapi melalui kebijakan yang kuat dan terkoordinasi.

Peran perlindungan sosial dalam menghadapi krisis

Perlindungan sosial berperan penting dalam menentukan kebijakan yang memadai selama krisis. Contohnya untuk:

- ▶ Memastikan semua orang dapat mengakses layanan kesehatan secara efektif
- ▶ Menjamin keamanan pekerjaan dan pendapatan bagi mereka yang terdampak krisis
- ▶ Berkontribusi dalam pencegahan kemiskinan, pengangguran dan informalitas
- ▶ Menjaga kestabilan ekonomi dan sosial serta perdamaian
- ▶ Menjadi stabilisator ekonomi dan sosial

Ketika perlindungan sosial tidak ada, usaha untuk mencegah penyebaran virus akan terhambat. Contoh konkritnya sebagai berikut:

- ▶ Ketiadaan perlindungan kesehatan yang universal mengekspos dan menstigmatisasi kelompok rentan, mengurangi kemauan dan kemampuan mereka untuk memperoleh pengobatan dan meningkatkan risiko penularan.
- ▶ Ketiadaan tunjangan sakit dengan tetap mendapat upah memaksa pekerja yang sakit tetap pergi bekerja, mempertaruhkan kesehatan mereka dan berisiko menularkan kepada orang lain.

² Di Tiongkok, misalnya, Biro Statistik Nasional mengumumkan peningkatan pengangguran kota sebesar 6,2 persen pada Februari 2020, angka tertinggi yang pernah ada, meningkat 5,2 persen dari angka Desember 2019 (Biro Statistik Tiongkok 2020)

- ▶ Ketiadaan perlindungan terhadap pengangguran, termasuk penggantian pendapatan sebagian, mengurangi kemampuan perusahaan mempertahankan pekerjaan, mengingat di saat yang bersamaan mereka juga harus mengatasi dampak keuangan akibat krisis.

Krisis-krisis yang lalu – finansial, ekonomi, dan kesehatan – telah memberikan beberapa pembelajaran, seperti:

- ▶ Pandemi yang lalu seperti SARS, MERS, dan Ebola menekankan perlunya kombinasi antara intervensi kesehatan yang efektif dan perlindungan sosial untuk menciptakan kebijakan yang memadai.
- ▶ Krisis keuangan Asia pada 1997 dan krisis ekonomi dan keuangan global 2008 telah menunjukkan peran penting perlindungan sosial dalam menstabilkan pendapatan keluarga dan menjaga permintaan agregat, serta berkontribusi dalam usaha pemulihan.³
- ▶ Memenuhi kebutuhan kelompok rentan merupakan prioritas.
- ▶ Termasuk dalam kelompok rentan adalah orang tua, penyandang disabilitas dan penderita penyakit kronis yang berisiko tinggi terhadap penyakit ini.
- ▶ Di negara dengan komposisi sektor informal yang tinggi, sebagian besar pekerja tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai. Para pekerja ini harus menjadi fokus utama dalam pembuatan kebijakan.
- ▶ Karena adanya hal-hal spesial dari krisis ini, mereka yang bekerja di luar standar ketenagakerjaan, seperti pekerja digital dan pekerja lepas juga masuk dalam kelompok rentan. Jasa mereka sangat dibutuhkan dan penting, tetapi mereka kebanyakan tidak menjadi peserta sistem perlindungan sosial yang sudah ada.⁴
- ▶ Pekerja rumah tangga juga sangat berisiko tinggi. Mereka bekerja di rumah pribadi, tempat yang sangat minim regulasi di mana hak pekerja jarang diperhatikan. Selain itu, sebagian besar dari mereka dipekerjakan secara informal, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap krisis.
- ▶ Pekerja migran, termasuk pekerja rumah tangga migran adalah kelompok yang juga rentan terhadap krisis COVID-19 ini. Bukan hanya mereka jarang terlindungi oleh sistem perlindungan sosial di negara tempat mereka bekerja, tetapi mereka juga menghadapi tantangan lebih ketika kembali ke negara asal dan keluarga mereka (ILO 2000).
- ▶ Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada para tunawisma dan mereka yang tinggal di pemukiman informal, di daerah yang padat penduduk dan tidak adanya akses atas air dan sanitasi, di mana tidak memungkinkan bagi mereka untuk meningkatkan kebersihan dan melakukan jarak sosial (Wilkinson 2020).

³ Pembelajaran dari krisis 2008 telah disimpulkan dalam beberapa publikasi (ILO 2010; 2011b; 2014; 2017; Social Protection Floor Advisory Group 2011).

⁴ Jasa seperti transportasi, penyimpanan, pengiriman dan juga platform kerja jarak jauh dan kolaborasi yang menyediakan jasa dengan keterampilan tinggi mengalami peningkatan permintaan. Sayangnya, kebijakan jaminan sosial yang sudah ada (cuti sakit, tunjangan pengangguran) sering tidak memberikan santunan untuk kategori pekerja ini (Mishra 2019) namun bisa diadaptasi (ILO, 2020c; OECD 2020) :

- ▶ Mayoritas pekerja di bidang kesehatan adalah perempuan. Sebagian besar dari mereka juga merupakan ibu, pengasuh dan juga bertanggung jawab menyediakan air dan bahan bakar untuk konsumsi rumah tangga. Selain itu, mereka banyak sekali terlibat dalam jenis pekerjaan yang rentan, termasuk pekerjaan informal (UN Women 2020). Memastikan kebijakan yang responsif terhadap isu gender sangatlah penting.

Memperkuat sistem kesehatan dan perlindungan sosial menjadi sangat penting dalam merespons krisis COVID-19 ini.

Respons yang efektif tergantung pada dialog sosial dan partisipasi mitra sosial serta pemangku kepentingan lainnya dalam menangani penyebab dan konsekuensi krisis, memastikan respons yang efektif terhadap krisis, pemulihan dan kestabilan sosial (ILO 2020a).

Banyak negara, termasuk negara-negara di kawasan ini, yang telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat sistem perlindungan sosial mereka sebagai respons dalam menghadapi krisis COVID-19.

Respons perlindungan sosial nasional

Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau

Memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau adalah hal utama yang perlu dilakukan untuk memastikan keterbatasan cakupan tidak menghalangi seseorang untuk mencari layanan kesehatan serta mencegah jatuhnya seseorang atau keluarga dalam kemiskinan karena harus membayar biaya kesehatan sendiri. Tidak hanya secara finansial, akses geografis juga sangat penting, terutama bagi mereka yang tinggal di perdesaan.

Kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi permintaan rawat inap yang tinggi – terutama kamar ICU – sangat penting untuk mengurangi kasus kematian yang dapat dicegah. Oleh karena itu, diperlukan tambahan dukungan finansial dan sumber daya material untuk sektor kesehatan.

Untuk merespons COVID-19, beberapa negara telah mengambil berbagai kebijakan untuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau, menutup kesenjangan dalam hal perlindungan kesehatan dan memperluas perlindungan finansial. Beberapa contohnya antara lain:

- ▶ Australia, Filipina, Jepang, Korea, Selandia Baru, Singapura, Tiongkok dan Vietnam adalah beberapa negara yang menyalurkan tambahan sumber fiskal pada sistem kesehatan melalui paket stimulus COVID-19.
- ▶ Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), lembaga asuransi kesehatan nasional Filipina, mencairkan 30 miliar peso untuk membantu rumah sakit yang terakreditasi. Lembaga ini menggunakan mekanisme penggantian sementara untuk memberi likuiditas kepada penyedia layanan kesehatan agar mereka dapat melakukan tindakan yang memadai di tengah tingginya permintaan.
- ▶ Selain itu, per tanggal 19 Februari 2020, paket PhilHealth juga menanggung tes COVID, rujukan dan isolasi (PhilHealth 2020a).
- ▶ Tiongkok mengadopsi kebijakan baru dalam reformasi layanan kesehatan yang komprehensif yang bertujuan membangun sistem jaminan medis multi-level dengan mengintegrasikan pencegahan, pengecekan dan pengobatan dalam paket perlindungan sosial kesehatan (ILO 2020d).



- ▶ Asuransi kesehatan di Tiongkok mulai menerapkan sistem penggantian biaya konsultasi daring untuk penyakit kronis dan umum guna mengurangi risiko penyebaran virus melalui kontak tatap muka di pusat layanan kesehatan (ILO 2020d).
- ▶ Di Tiongkok, sejak 23 Januari 2020, mereka yang terinfeksi COVID-19 di tempat kerja berhak mendapatkan tunjangan kecelakaan kerja (ILO 2020d).
- ▶ Thailand memperluas perlindungan finansial dalam pengeluaran berkaitan dengan kesehatan baik untuk warga lokal maupun asing melalui pembukaan akses ke Perlindungan Universal untuk Pasien Darurat (UCEP) atau dalam hal ini pasien COVID-19. Langkah ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit pemerintah maupun swasta terdekat secara gratis (The Thaiger 2020).
- ▶ Di Vietnam, karantina, pengecekan dan pengobatan kasus positif mulai didanai dengan anggaran negara, berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular yang berlaku di negara tersebut.
- ▶ Pengobatan peserta Asuransi Kesehatan Sosial (SHI) untuk COVID-19 di Vietnam akan dibiayai oleh dana SHI, sementara mekanisme rujukan normal untuk sementara dihapuskan.
- ▶ Di Singapura, di mana layanan kesehatan dibiayai oleh sektor publik dan swasta, pemerintah memutuskan untuk membayar tagihan rumah sakit secara penuh bagi pasien terindikasi COVID-19 (Min 2020). Selain itu, klinik dokter umum di bawah skema Kesiapan Layanan Kesehatan Masyarakat Primer (PHPCs) atau akan diaktifkan bagi para pasien dengan gejala pernafasan di mana warga negara Singapura dan penduduk tetap akan membayar biaya yang telah disubsidi sebesar 10 dolar Singapura atau sekitar 6,85 dolar AS untuk konsultasi dan pengobatan serta para lansia membayar 5 dolar Singapura atau 3,43 dolar AS (Channel News Asia 2020b).

Tunjangan sakit: memastikan jaminan pendapatan selama cuti sakit

Kebijakan terkait tunjangan sakit menjadi isu sentral bagi negara-negara terdampak COVID-19.

Pekerja tidak dapat mengandalkan tunjangan sakit atau hak cuti sakit berbayar, khususnya bagi mereka yang bekerja di bentuk pekerjaan yang tidak standar, mungkin akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan saat sakit atau menolak untuk melakukan isolasi diri, kemudian berpotensi untuk menularkan virus kepada rekan kerja ataupun klien. Ini juga dapat menyebabkan situasi di mana terjadi lamanya waktu tunggu untuk pembayaran tunjangan sakit atau hak sakit dibayar. Sebaliknya, individu yang aman secara keuangan mungkin akan lebih mudah melakukan pengecekan.

Beberapa negara telah melakukan langkah-langkah untuk memperluas tunjangan sakit yang didanai publik untuk pekerja yang tidak ditanggung selama cuti sakit. Beberapa contoh dari berbagai negara:

- ▶ Jepang memperluas akses tunjangan sakit tunai bagi orang-orang yang dikarantina atau didiagnosa terkena virus korona. Hal ini secara simultan menghapuskan persyaratan untuk mendapatkan surat izin sakit (ISSA 2020).
- ▶ Beberapa negara menghapuskan waktu tunggu. Australia menghapuskan waktu tunggu satu minggu untuk bantuan pendapatan, termasuk tunjangan sakit (Pemerintah Australia 2020).
- ▶ Paket PhilHealth COVID-19 menyediakan tunjangan untuk isolasi yang memberikan bantuan finansial sebesar 14,000 peso atau 273,6 dolar AS bagi orang-orang yang



dikarantina dan dalam pengawasan (PhilHealth, 2020a).

- ▶ Di Vietnam, individu yang terinfeksi dan dikarantina di luar rumah berhak mendapatkan tunjangan makanan sebesar 60,000 dong atau 2,59 dolar AS per hari, sedangkan yang dikarantina di rumah mendapatkan 40,000 dong atau 1,72 dolar AS.⁵
- ▶ Singapura akan membayar pengusaha yang pekerjanya dikarantina sebesar 100 dolar Singapura atau setara 68,5 dolar AS per hari selama masa karantina. Manfaat ini juga dibayarkan kepada para pekerja lepas (Kementerian Ketenagakerjaan Singapura, 2020).

Perlindungan pengangguran: mencegah hilangnya pekerjaan dan membantu mereka yang kehilangan pekerjaan

Dalam merespons krisis COVID-19, banyak negara yang memanfaatkan skema tunjangan pengangguran yang mereka miliki untuk memastikan keamanan pendapatan bagi para pekerja.

Ada empat instrumen utama yang sering digunakan, yaitu tunjangan pengangguran, subsidi gaji, perluasan atau pengenalan tunjangan pengangguran sementara guna mengompensasi pengurangan jam kerja akibat krisis⁶, serta layanan ketenagakerjaan (seperti pelatihan dan penempatan kerja) sebagai pelengkap bantuan pendapatan untuk para pengangguran.

Upaya tambahan yang dilakukan adalah dengan relaksasi dalam kondisi sebelum pencarian pekerjaan yang berkaitan dengan pembayaran asuransi pengangguran. Contoh yang dilakukan beberapa negara adalah sebagai berikut:

- ▶ Tiongkok memberikan santunan pengangguran sementara bagi para pekerja. Maksudnya, para pekerja yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapat asuransi pengangguran dapat mendaftar ke dalam skema bantuan pengangguran (lebih rendah dibandingkan asuransi pengangguran) (ILO 2020d).
- ▶ Malaysia mengumumkan skema bantuan moneter sebesar 600 ringgit per bulan atau sekitar 135 dolar AS maksimal hingga enam bulan untuk pekerja yang tidak mendapat hak cuti dibayar. Skema ini berlaku bagi mereka yang tidak mendapat hak cuti dibayar sejak 1 Maret atau yang telah berkontribusi di skema asuransi ketenagakerjaan dengan gaji bulanan di bawah 4.000 ringgit atau 900 dolar AS per bulan (The Edge Markets 2020).

⁵ Mengingat rata-rata upah bulanan Vietnam yang sebesar 150 dolar AS, krisis ini berpotensi mengalami penurunan hingga 2-3 kali lipat selama masa karantina karena tidak dapat bekerja (Phuong et al. forthcoming).

⁶ Tunjangan-tunjangan semacam ini berperan penting untuk membantu pemulihan setelah krisis 2008/2009: contohnya di Jerman, tunjangan pengangguran memungkinkan pengusaha mempertahankan pekerjanya selama krisis, menghindari pemutusan hubungan kerja dan biaya perekrutan kembali dan mampu merespons dengan cepat saat pasar kembali normal, sehingga dapat dari krisis dengan cepat (ILO 2011). Rata-rata pengurangan jam kerja adalah sebesar 30,5 persen yang berpengaruh pada sekitar 432.000 pekerjaan. Kehilangan pekerjaan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran sekitar satu poin persentase (ILO 2011a, 66–67).



- ▶ Jepang melonggarkan Subsidi Penyesuaian Ketenagakerjaan sebagai satu cara untuk memberi insentif pada para pengusaha agar mereka mau mempertahankan pekerjaannya dengan membayar tunjangan cuti dan dengan mengizinkan pekerja mendapatkan hak cuti dibayar sebagian. Subsidi ini mengganti dua pertiga tunjangan cuti untuk UKM dan setengah untuk perusahaan besar (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Hal penting lainnya adalah setelah pulih dari krisis, Jepang dapat memobilisasi pekerja (mengingat tetap adanya hubungan kerja dengan pengusaha) lebih cepat dibandingkan negara-negara yang membiarkan para pekerja pergi begitu saja.
- ▶ Republik Korea memfasilitasi akses untuk program subsidi retensi pekerjaan dan untuk sementara menaikkan subsidi gaji bagi perusahaan yang mempertahankan pekerjaannya dengan memberikan hak cuti dibayar mulai dari 50 hingga 65 persen bagi perusahaan besar dan 66 hingga 75 persen bagi UKM (OECD 2020).
- ▶ Untuk 2020 dan 2021, Kantor Jaminan Sosial (SSO) di Thailand mengesahkan peraturan untuk meningkatkan tunjangan pengangguran dan durasinya dari 50 persen dan 180 hari menjadi 70 persen dan 200 hari jika pekerja terkena PHK. Untuk pemberhentian kerja secara sukarela atau karena berakhirnya masa kontrak, diberikan tunjangan mulai dari 30 hingga 40 persen dan hingga 90 hari.
- ▶ SSO juga menyediakan subsidi untuk orang-orang yang diliburkan tanpa dibayar karena perusahaan tutup sementara mengikuti instruksi pemerintah guna mencegah penyebaran virus. Penggantian upah mulai dari 50 hingga 60 persen akan dibayarkan. Setelah masa ini, para penerima manfaat mungkin masih bisa menerima tunjangan pengangguran seperti yang sudah dijelaskan di atas.
- ▶ Terakhir, paket bantuan di Thailand juga termasuk kemungkinan untuk mengizinkan UKM mengurangi pengeluaran gaji tiga kali mulai April-Juli untuk pekerja yang menjadi peserta SSO dan mendapat gaji 15.000 baht atau setara 456 dolar AS. Untuk bisa mendapatkannya, UKM harus mempertahankan jumlah pekerja yang sama selama periode ini seperti yang sudah diasuransikan oleh SSO pada akhir Desember 2019 (Bangkok Post, 2020).
- ▶ Sistem Jaminan Sosial Filipina mengalokasikan 1,2 milyar peso atau setara 23,5 juta dolar AS untuk menanggung tunjangan pengangguran bagi para pekerja yang diberhentikan. Dana ini akan dialokasikan bagi 30.000 hingga 60.000 pekerja yang akan kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari PHK (Departemen Keuangan Filipina 2020).
- ▶ Di Filipina, Departemen Ketenagakerjaan mendorong pengusaha untuk mengadopsi sistem pengaturan kerja yang fleksibel (misalnya telekomunikasi melalui telepon, bekerja dari rumah, mengurangi jam kerja, rotasi pekerja yang masuk dan diliburkan). Bagian dari insentif ini adalah ketetapan dari pemerintah untuk memberikan bantuan tunai sebesar 5.000 peso atau setara 97,6 dolar AS per pekerja sektor swasta di mana pengaturan sistem kerja fleksibel diterapkan (Departemen Ketenagakerjaan Filipina 2020).
- ▶ Masih di Filipina, program beasiswa dari Otoritas Pendidikan Teknik dan Pengembangan Keterampilan (TESDA) atau akan membantu pekerja yang terdampak atau mengalami pemberhentian sementara dengan peningkatan keterampilan atau pelatihan ulang. Hal ini termasuk kursus gratis bagi mereka yang ingin mendapatkan keterampilan baru dari rumah, perangkat seluler dan komputer melalui TESDA Online Program (Departemen Keuangan Filipina 2020).



- ▶ Singapura meluncurkan Skema Dukungan Pekerjaan sebesar 1,3 miliar dolar Singapura atau setara 890 juta dolar AS untuk membantu perusahaan mempertahankan pekerja lokal. Pengusaha akan menerima delapan persen hibah tunai bagi setiap besaran gaji bulanan pekerja lokal yang dibayar oleh Dewan Penyedia Dana Sentral untuk bulan Oktober hingga Desember (dengan maksimal pendapatan sebesar 3.600 dollar Singapura atau 2.463,8 dolar AS. Pembayaran akan dilakukan pada akhir Juli (Channels News Asia 2020).
- ▶ Hongkong, Tiongkok, meningkatkan dana tahunan untuk program ketenagakerjaan dan meningkatkan plafon tunjangan bagi pelatihan di tempat kerja atau *on-the-job-training* (Pemerintah Hong Kong, 2020).
- ▶ Republik Korea mengawasi pelatihan ulang bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pemerintah menyediakan bantuan gaji untuk pengusaha kecil dan meningkatkan tunjangan pencari kerja untuk pekerja muda dan memperkenalkan kembali tunjangan untuk rumah tangga kelas berpenghasilan rendah (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Australia memperluas jangkauan Program Pencari Kerja dan suplemen mencegah virus korona kepada pedagang, pekerja lepas, buruh harian, pekerja kontrak yang memenuhi kriteria sebagai akibat dari penurunan ekonomi yang diciptakan oleh virus korona (Pemerintah Australia 2020).
- ▶ Di bawah Program Pencari Kerja, Australia menghapuskan kewajiban timbal-balik (yaitu kondisi pencarian kerja) bagi mereka yang mempunyai kewajiban merawat atau membutuhkan isolasi diri (Pemerintah Australia 2020).
- ▶ Pemerintah Indonesia membentuk skema baru bernama Kartu Pra-Kerja. Program ini disiapkan utamanya untuk memberi pelatihan kepada 2 juta pekerja dengan membayar 500.000 rupiah atau setara 34,32 dolar AS per peserta per bulan guna menutup biaya akomodasi dan transportasi selama program (The Jakarta Post 2020).

Tunjangan hari tua, ahli waris dan kecacatan

Melihat kerentanan kelompok lanjut usia dan orang dengan disabilitas, tunjangan hari tua/pensiun, ahli waris dan juga kecacatan memegang peranan penting dalam memastikan keamanan pendapatan bagi mereka yang terdampak krisis.

Beberapa negara sudah melakukan upaya untuk mempercepat pembayaran pensiun atau meningkatkan tingkatannya.

- ▶ Di Hongkong, Tiongkok, paket bantuan kesejahteraan memberi satu bulan tambahan tunjangan hari tua dan kecacatan yang merupakan skema-skema tanpa pengujian kriteria berarti. Jumlah pembayaran untuk tunjangan hari tua adalah sebesar 1.385 dolar Hongkong atau 178,57 dolar AS (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Kebijakan Singapura terkait kesejahteraan termasuk pengisian *PASSION silver card* sebesar 100 dolar Singapura atau 68,5 dolar AS bagi para lansia (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Di Australia, diberikan satu kali tunjangan sebesar 750 dolar Australia atau 431,9 dolar AS, termasuk untuk mereka yang memiliki kartu kesehatan negara persemakmuran untuk lansia (misalnya pensiunan) (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).

Memberikan bantuan finansial melalui pendampingan sosial, transfer tunai dan dukungan lainnya

Mengingat besarnya konsekuensi ekonomi akibat krisis COVID-19, banyak negara yang mengambil kebijakan memberikan dukungan pendapatan kepada rakyatnya melalui dukungan sosial atau tunjangan-tunjangan yang dibayar melalui pajak.

Pemberian bantuan tunai bagi masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan sebuah respons yang efektif guna memastikan keberlanjutan konsumsi, mengingat kelompok ini mengalokasikan sebagian besar tunjangannya untuk kebutuhan dasar dan tunjangan ini memiliki efek ganda.

Sebagai penstabil makro, bantuan tunai efektif karena bentuk bantuan ini bisa membawa dampak cepat dibandingkan kebijakan fiskal lainnya. Mereka memiliki dampak kontra-siklus yang berperan sebagai penstabil otomatis.

Langkah-langkah yang diambil negara-negara termasuk memperbesar bantuan sosial yang sudah ada (termasuk bantuan tunai, percepatan pembayaran dan pelonggaran kriteria mendapat tunjangan untuk memperluas jangkauan, serta menciptakan skema-skema bantuan sosial lain).

Beberapa negara memasukkan juga bantuan pendapatan sekali bayar untuk semua rakyat (*one-off Universal Basic Income*).

Kebijakan lain untuk menutup biaya pemenuhan nutrisi, bahan bakar dan keperluan dasar lain juga dilakukan oleh beberapa negara. Penutupan sekolah membuat negara perlu memikirkan mekanisme lain untuk menyalurkan bantuan makanan sebagai pengganti makanan gratis di sekolah. Menjaga kestabilan harga bahan makanan pokok dan jasa juga diperlukan guna mencegah spekulasi dan menjaga daya beli masyarakat kelas bawah.

Contoh kebijakan yang diterapkan beberapa negara di Asia antara lain:

- ▶ Di India, negara bagian Uttar Pradesh mengumumkan pembayaran daring langsung kepada pekerja miskin dan pekerja harian yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Pedagang sayur, kuli bangunan, penarik becak atau becak motor, dan pekerja tidak tetap di toko akan menjadi target kebijakan ini (Aljazeera, 2020).
- ▶ Negara bagian Kerala, India, mulai melakukan pembagian makan siang bagi 300.000 anak yang belajar di 33.115 pusat pengasuhan anak perdesaan yang telah ditutup akibat pandemi ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan makanan bagi anak-anak ini tidak terganggu (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Di Hongkong, Tiongkok, 1,33 juta penerima Pembayaran Bantuan Jaminan Sosial Komprehensif, tunjangan hari tua, tunjangan biaya hidup masa tua dan tunjangan kecacatan menerima tambahan 1 bulan mulai 7 Januari (Pemerintah Hongkong Wilayah Administrasi Khusus 2020a).
- ▶ Sementara Hongkong mengumumkan bantuan tunai universal sebesar 1.280 dolar Hongkong (165 dollar AS) bagi 7 juta penduduk dewasa dengan tujuan memacu pertumbuhan PDB 1 persen pada tahun ini (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Pemerintah Hongkong, Tiongkok juga membayar satu bulan sewa rumah bagi para penghuni berpenghasilan rendah yang tinggal di pemukiman publik dan memperluas subsidi transportasi untuk bekerja (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Di Australia, satu kali pembayaran sebanyak 750 dolar Australia (432,9 dolar AS) akan diberikan kepada jaminan sosial, veteran dan penerima bantuan pendapatan lainnya,

membantu sekitar 6,5 juta penduduk berpenghasilan rendah di Australia. Tujuannya untuk mendorong keamanan pendapatan dan mendorong permintaan agregat (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).

- ▶ Malaysia mengumumkan perluasan pembayaran Bantuan Sara Hidup (BSH), sebuah bentuk bantuan tunai bagi keluarga rentan. Kebijakan ini termasuk antisipasi pembayaran tahap 2 (diperkirakan sekitar bulan Mei namun dimajukan ke bulan Maret) sebesar 760 juta ringgit (171,1 juta dolar AS) untuk membantu sekitar 3,8 juta keluarga penerima BSH. Mereka juga akan mendapat tambahan 100 ringgit (22,5 dolar AS) yang akan ditransfer ke rekening mereka, serta dana sebesar 50 ringgit (11,2 dolar AS) dalam bentuk uang elektronik yang akan dibagikan pada Mei 2020. Tambahan lainnya sebesar 500 juta ringgit (12,5 juta dolar AS) bagi 5 juta penerima BSH lainnya (Malay Mail 2000).
- ▶ Republik Islam Iran berencana membantu 3 juta keluarga berpenghasilan rendah dengan pekerjaan tidak permanen dengan bantuan tunai mencapai 6 juta rial (400 dolar AS) dalam empat tahap (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Singapura akan memberikan pembayaran satu kali sebagai pengganti pendapatan dasar universal. Sebagai bagian dari Paket Dukungan dan Kepedulian sebesar 1,6 miliar dolar Singapura (1,1 miliar dolar AS), semua warga Singapura berusia 21 tahun ke atas akan menerima satu kali bantuan tunai sebesar 300 dolar Singapura (205,38 dollar AS), 200 dolar Singapura (136,9 dollar AS), 100 dolar Singapura (61,5 dollar AS), tergantung pendapatan mereka. Uang tunai juga akan diberikan kepada keluarga dengan anak-anak dan orang lanjut usia. Selain itu, paket kebijakan ini juga mencakup kupon belanja sebesar 100 dolar Singapura (61,5 dolar AS) bagi keluarga berpenghasilan rendah (Channels News Asia 2020).
- ▶ Singapura juga akan memanfaatkan Skema Kredit Gaji. Skema ini sekarang mendanai kenaikan gaji bagi warga Singapura yang mendapatkan gaji sebesar hingga 4.000 dolar Singapura (2,738 dollar AS). Persyaratannya maksimal gaji akan dinaikkan menjadi 5.000 dolar Singapura (3.422 dollar AS) agar semakin banyak warga Singapura yang mendapat manfaat (Channels News Asia 2020).
- ▶ Untuk menolong pekerja dengan upah rendah, pemerintah Singapura akan memberikan Pembayaran "Workfare" khusus. Warga Singapura peserta Workfare akan menerima tambahan 20 persen untuk pekerjaan yang dilakukan tahun lalu dengan minimal pembayaran sebesar 100 dolar Singapura (61,5 dollar AS) (The New Paper 2020).
- ▶ Sebagai bagian dari paket dukungan bagi supir taksi atau penyewaan mobil pribadi yang terdampak wabah COVID-19, sekitar 400.000 supir di Singapura akan menerima 20 dolar Singapura (13,7 dolar AS) per kendaraan per hari selama 3 bulan, dibayar oleh pemerintah dan operator dengan kontribusi sama (Channels News Asia 2020a).
- ▶ Di Indonesia, pemerintah memberikan tambahan dana untuk Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) guna membantu 15 juta keluarga berpenghasilan rendah membeli makanan pokok. Tambahan dana tersebut sebesar 324 juta dolar AS. Sebagai bagian dari paket stimulus, keluarga berpenghasilan rendah juga akan menerima 200.000 rupiah (13,97 dolar AS) per bulan dalam bentuk tunai, naik dari semula hanya 150.000 rupiah (10 dolar AS), untuk 6 bulan ke depan (ASEAN Business News 2020).
- ▶ Kota Seoul, Republik Korea, akan melaksanakan program bantuan finansial kepada pekerja berpenghasilan rendah, pekerja paruh waktu dan pekerja lepas, yang tidak mendapat manfaat dari sistem bantuan finansial yang sudah ada. Bantuan ini sebesar antara 300.000–500.000 won atau 238,9–398,1 dolar AS yang akan dibayarkan dalam bentuk kupon atau kartu pra-bayar (Pemerintah Kota Metropolitan Seoul 2020).

- ▶ Kota Osaka di Jepang berencana menawarkan makan siang gratis untuk siswa SD dan SMP Negeri mulai April tergantung kapan sekolah akan buka kembali. Program ini dapat membantu orang tua menghemat sekitar 50.000 yen (470 dolar AS) dan 60.000 (538 dolar AS) per anak per tahun (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).

Kebijakan cuti dan perawatan keluarga

Banyak negara terdampak COVID-19 telah menerapkan atau berencana menutup sekolah dan universitas. Penutupan ini menambah tantangan bagi para orang tua. Konsekuensinya, kebijakan cuti keluarga menjadi sangat penting. Selain itu, banyak pekerja yang harus merawat keluarganya yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, beberapa negara telah memperluas peraturan cuti sakit dibayar dan tunjangan lainnya untuk membantu pekerja yang harus merawat keluarganya yang sakit atau dalam masa isolasi diri.

- ▶ Di Jepang, pemerintah telah mengumumkan subsidi untuk memberi kompensasi perusahaan yang menerapkan cuti keluarga bagi pekerja yang keluarganya terdampak penutupan sekolah untuk memastikan keberlanjutan pembayaran gaji (OECD 2020).
- ▶ Juga di Jepang, pemerintah akan memberikan 4.100 yen (36,82 dolar AS) untuk pekerja lepas yang dipaksa tinggal di rumah karena sekolah tutup (Anadolu Agency 2020).
- ▶ Di Republik Korea, pemerintah akan mengeluarkan kupon senilai total 2,4 triliun won bagi keluarga kelas bawah karena anak-anak harus berpindah dari tempat pengasuhan anak ke rumah. Paket ini juga memberi orang tua hingga lima hari cuti merawat anak dan diberikan 50.000 won (39,63 dolar AS) per hari (Gentilini, Almenfi, Orton 2020).
- ▶ Australia memperluas akses pembayaran bantuan pendapatan untuk orang-orang yang harus merawat orang yang terkena COVID-19 (Pemerintah Australia 2020).
- ▶ Di Singapura, pengusaha dihimbau untuk mendukung kebutuhan perawatan dengan mengizinkan pekerja menggunakan jatah cuti dan mempermudah memberikan cuti dibayar dan cuti tidak dibayar (Kementerian Ketenagakerjaan Singapura 2020a).

Memodifikasi sistem pembayaran iuran jaminan sosial dan pajak untuk usaha

Untuk mengatasi kendala likuiditas pada perusahaan, banyak negara yang telah memutuskan untuk mengizinkan perusahaan menunda pembayaran kontribusi asuransi sosial dan pajak.

- ▶ Di Tiongkok, pemerintah provinsi diizinkan untuk membebaskan perusahaan menengah, kecil dan mikro dari kontribusi pemberi kerja terhadap tiga skema asuransi sosial hingga lima bulan, yaitu: pensiun, pengangguran dan cedera kerja. Perusahaan yang lebih besar dapat mengurangi kontribusinya hingga 50 persen hingga tiga bulan (ILO 2020d).
- ▶ Provinsi Hubei di Tiongkok menerapkan kebijakan yang menguntungkan. Kebijakan ini menghapuskan kontribusi UKM hingga lima bulan (tergantung pada dampaknya), dan mengurangi separuh kontribusi perusahaan besar hingga tiga bulan (tergantung pada dampaknya). Perusahaan yang digolongkan berada dalam "krisis operasional" dapat menunda pembayaran kontribusi hingga enam bulan (ILO 2020d).
- ▶ Vietnam menangguhkan pembayaran premi asuransi sosial untuk tunjangan pensiun dan tunjangan kematian selama maksimal 12 bulan dan tanpa denda keterlambatan pembayaran untuk bisnis yang menghadapi kesulitan akibat epidemi COVID-19.

- ▶ Dana Kepegawaian di Malaysia mengurangi kontribusi pekerja yang awalnya 11 persen dari gaji menjadi 4 persen. Pengurangan ini diharapkan menambah ketersediaan uang tunai di rumah tangga sebesar 10 miliar ringgit (2,25 miliar dolar AS) (The Star 2020).
- ▶ Di Thailand, SSO akan mengurangi kontribusi yang diberikan pekerja dan pengusaha dari lima persen menjadi empat persen selama enam bulan dengan perpanjangan tenggat waktu pembayaran kontribusi oleh pengusaha dan pekerja selama tiga bulan (NNT 2020).
- ▶ Di Filipina, PhilHealth memperpanjang batas waktu untuk membayar kontribusi bagi kontributor langsung yang membayar sendiri. Mereka sekarang dapat membayar kontribusi kuartal pertama mereka pada atau sebelum 30 April dari semula 31 Maret dan tanpa bunga (PhilHealth 2020b).

Tindakan-tindakan tersebut dapat memberikan bantuan jangka pendek sementara yang berarti bagi perusahaan-perusahaan yang terkena dampak dan tidak merusak keuangan negara serta lembaga-lembaga jaminan sosial, terutama pada saat sistem perlindungan sosial perlu mengeluarkan dana lebih untuk memenuhi peningkatan permintaan. Penting juga untuk memastikan bahwa penangguhan kontribusi ini tidak akan memengaruhi hak-hak kerja di masa depan.

Mengadaptasi prosedur administrasi dan mekanisme layanan

Kebijakan administrasi yang memanfaatkan teknologi dan cepat dapat mempercepat permintaan atau pemrosesan klaim dan pencairan manfaat selanjutnya.

Menghapuskan persyaratan kunjungan langsung (contohnya untuk klaim tunjangan pengangguran) atau mendorong orang-orang untuk melengkapi formulir daring atau melalui telepon juga bisa dilakukan. Langkah ini juga lebih efisien dalam mendukung protokol menjaga jarak fisik. Contohnya sebagai berikut:

- ▶ Tiongkok meningkatkan penggunaan platform daring untuk layanan jaminan sosial (seperti tunjangan pengangguran) untuk menghindari kontak fisik dalam hal persetujuan klaim, pembayaran dan layanan terkait lainnya (ILO 2020d).
- ▶ Juga di Tiongkok, Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial (MOHRSS) mengeluarkan pemberitahuan tentang pengelolaan layanan asuransi sosial selama wabah COVID-19. Mereka meminta administrasi asuransi sosial di semua tingkatan untuk berkonsultasi dengan departemen keuangan dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan guna memastikan dana pensiun dibayarkan setiap bulan melalui layanan daring (ILO 2020d).
- ▶ Di Filipina, PhilHealth memperpanjang periode pengajuan klaim perlindungan universal untuk pasien darurat dari yang biasanya 60 hari menjadi 120 hari guna memudahkan penyedia layanan kesehatan (PhilHealth 2020b).
- ▶ Di Australia, beberapa langkah dilakukan guna mempercepat proses klaim (misalnya melalui saluran daring dan seluler) dan mempersingkat proses aplikasi dengan mengurangi persyaratan yang ada untuk sementara waktu (Pemerintah Australia 2020).

Kesimpulan⁷

- ▶ Krisis ini telah memberi ilustrasi perlunya menegaskan kembali prinsip solidaritas sosial yang dapat mendukung perlindungan sosial universal dan sentralitasnya untuk memastikan terciptanya masyarakat yang adil secara sosial (ILO 2020d; ILO 2019a, 2019b).
- ▶ Sistem perlindungan sosial yang kuat akan menyediakan penyangga untuk mengatasi tantangan ganda dari peningkatan pengeluaran dan penurunan pendapatan, tetapi krisis berskala besar membutuhkan tambahan dana yang signifikan untuk perlindungan sosial, guna memastikan tunjangan dan layanan yang memadai dan komprehensif bagi semua orang yang membutuhkan.
- ▶ Upaya lebih lanjut diperlukan untuk negara-negara yang belum mempunyai sistem perlindungan kesehatan dan sosial yang memadai guna memastikan respons krisis yang cepat dan tetap meneruskan upaya ini setelah masa krisis.
- ▶ Membuat perlindungan sosial yang kuat akan membutuhkan alokasi sumber daya mendesak yang cukup. Harga untuk ketiadaan atau keterlambatan aksi jauh lebih tinggi.
- ▶ Perlindungan sosial harus dilihat sebagai investasi, bukan sebagai biaya tambahan. Krisis-krisis yang terjadi sebelumnya telah mengkonfirmasi betapa pentingnya peran perlindungan sosial sebagai penyangga sosial dan penstabil ekonomi yang terpadu guna melancarkan dan memastikan peran serta fungsi masyarakat.
- ▶ Pembelajaran dari krisis-krisis sebelumnya menunjukkan intervensi skala besar yang dirancang dengan baik lebih efektif ketimbang pendekatan sedikit demi sedikit (ILO 2020a).
- ▶ Paket stimulus fiskal, jika memungkinkan harus dapat meningkatkan dukungan yang dibutuhkan, khususnya ketentuan tentang hal yang dibiayai pajak untuk melengkapi ketentuan yang sudah ada.

⁷ Untuk informasi lebih lengkap lihat publikasi ILO (2020). Social protection responses to the Covid-19 crisis. Country responses and policy considerations. *Spotlight Brief*. ILO: Geneva.

Daftar Pustaka

- Aljazeera. 2020. [‘India promises compensation to workers hit by coronavirus’](#) . 19 March 2020.
- Anadolu Agency. 2020. [‘COVID-19 Japan moves to national emergency’](#). 10 March 2020.
- ASEAN Business News. 2020. [‘Indonesia Unveils Stimulus Package to Combat Coronavirus Impact’](#). 10 March 2020.
- Bangkok Post. 2020. [‘B400bn booster shot given nod - Stimulus Package to ease virus impact’](#) . 11 March 2020.
- Channels News Asia. 2020. [‘S\\$77 million package to help taxi, private-hire drivers affected by COVID-19 outbreak’](#) . 13 February 2020.
- . 2020a. ‘Budget 2020; 2020. [‘Corona Virus package help taxi and private hire drivers’](#). 13 February 2020.
- . 2020b. [‘COVID-19 outbreak: What you need to know about the Public Health Preparedness Clinics’](#). 18 February 2020.
- Department of Finances Philippines. 2020. [‘Gov’t economic team rolls out P27.1 B package vs COVID-19 pandemic’](#) . 16 March 2020.
- Department of Labor and Employment Philippines. 2020. Department Order No. 209 – [Guidelines on the Adjustment Measure Program for Affected Workers Due to the Coronavirus Disease 2019](#) .
- Diwakar, Vidya. 2020. ODI. [From Pandemics to Poverty: The Implications of Coronavirus for the Furthest Behind’](#). 10 March 2020.
- Gentilini, Ugo, Mohamed Almenfi, and Ian Orton. 2020. [‘Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures’](#). March 2020.
- Government of Australia. 2020. [‘Fact Sheet: Economic Response to the Coronavirus’](#). 2020.
- Government of the Hong Kong Special Administrative Region. [‘2020 21 Budget Highlights’](#). 2020.
- . 2020a. [‘The Government of the Hong Kong Special Administrative Region: Press Release’](#).
- ILO. 2010. [‘World Social Security Report 2010/11: Providing Coverage in the Time of Crisis and Beyond’](#). Geneva: International Labour Office.
- . 2011a. [‘Social Protection Floors for Social Justice and a Fair Globalization, Report IV\(1\), 101th Session of the International Labour Conference 2012’](#). Geneva: International Labour Office.
- . 2011b. [‘Social Security for Social Justice and a Fair Globalization: Recurrent Discussion on Social Protection \(Social Security\) under the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, Report VI, 100th Session of the International Labour Conference’](#). Report VI. Geneva: International Labour Office.
- . 2014. [‘World Social Protection Report 2014/15: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice’](#). Geneva: International Labour Office.

———. 2017. [‘World Social Protection Report 2017-19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals’](#). Geneva: International Labour Office.

———. 2020a. [‘COVID-19 and World of Work: Impacts and Responses’](#). Geneva: International Labour Organization

———. 2020b. ‘Impact of the COVID-19 on the Health Sector’. Spotlight Brief. Geneva: International Labour Office.

———. 2020c. ‘Social Protection Responses to the Covid-19 Crisis. Country Responses and Policy Considerations’. Spotlight Brief. Geneva: International Labour Office.

———. 2020d. [‘Social Security Policy Monitor China’](#). Beijing: International Labour Office.

ISSA. 2020. [‘COVID-19 Crisis: A Renewed Attention to Sickness Benefits’](#), 2020.

Jakarta Post 2020. [‘Indonesia advances pre-employment card program to tackle pandemic impacts’](#). 13 March 2020.

Malay Mail. 2020. [‘BHS payment scheduled for May to be paid today, says PM’](#) , 16 March 2020.

Min, Ang Hwee. 2020. [‘COVID-19 Outbreak: What You Need to Know about the Public Health Preparedness Clinics’](#), 2020

Ministry of Manpower of Singapore. 2020. [‘LOA / SHN Support Programme for Businesses and SEPs’](#). 2020.

———. 2020a. [‘General Advisory for workplace measures’](#), 2020.

Mishra, Digbijay. 2019. 2019. [‘Gig Economy Weighs Impact of Social Security for Workers’](#). 2019.

National Bureau of Statistics of China. 2020. “Unemployment rate rises under the impact of the epidemic” [translated from Chinese]. 16 March 2020.

NNT. 2020. [‘SSO helps insured people during Covid-19 epidemic’](#). 22 March 2020

OECD. 2020. [‘Supporting People and Companies to Deal with the Covid-19 Virus: Options for an Immediate Employment and Social-Policy Response’](#). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. March 2020

PhilHealth. 2020a. [‘OFFICIAL STATEMENT COVERAGE ON TEST FOR COVID-19’](#). Manila: PhilHealth. 2020.

———. 2020b. [‘PhilHealth to Release P30 billion to Hospitals to Fight CoViD-19’](#). 2020.

Seoul Metropolitan Government, 2020. [‘Health and Welfare COVID-19’](#). March 2020

Social Protection Floor Advisory Group. 2011. [‘Social Protection Floor for a Fair and Inclusive Globalization: A Report of the Advisory Group Chaired by Michelle Bachelet and Convened by the ILO with the Collaboration of the WHO’](#)

The Edge Markets. 2020. [‘Malaysia’s Economic Stimulus Package with Additional Measures, Says PM Muhyiddin’](#), March 2020.

The News Minute. 2020 . [‘COVID-19: Anganwadis Shut, Kerala Govt Home Delivers Mid-Day Meal Supplies to Kids’](#), 13 March 2020.

The News Paper. 2020. '[16 billion dollar covid-19 relief package for Singaporean Households](#)', 19 February 2020.

The Star. 2020. '[Pros and cons to lowering EPF contribution rates](#)'. 23 February 2020.

The Thaiger. 2020. '[New Covid-19 Specialist Hospital to Open as Thai Government Steps up Response](#)'. 2020

UNCTAD. 2020. '[Coronavirus: Can Policymakers Avert a trillion-Dollar Crisis?](#)'. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development. 2020.

UN Women. 2020. '[Paying attention to women's needs and leadership will strengthen COVID-19 response](#)'. 19 March 2020.

Wilkinson, Anne. 2020. '[The Impact of COVID-19 in Informal Settlements – Are We Paying Enough Attention?](#)', IDS Opinion (blog)